

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang semakin pesat perkembangannya serta semakin canggih dan modernnya teknologi dan juga siklus bisnis seperti sekarang ini, persaingan ekonomi nasional bahkan dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat pula. Oleh sebab itu, perusahaan yang telah atau belum menerapkan tata kelola yang baik dituntut agar dapat menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat diandalkan untuk mendukung perkembangan perusahaan dalam kegiatannya untuk bertahan hidup dan memajukan usahanya agar lebih baik kedepannya. Karena, laporan keuangan yang andal, sangatlah bermanfaat bagi para penggunanya dalam hal pengambilan keputusan, agar tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan langkah selanjutnya.

Oleh karena itu, apabila pengambilan keputusan tidak didasarkan pada laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, maka hal itu akan menyebabkan interpretasi yang berbeda antar pemakai laporan keuangan sehingga dapat menyesatkan dan berdampak pada kesalahan dalam pengambilan keputusan yang tidak tepat atau sesuai dengan keadaan perusahaan. Dan dalam rangka untuk menghindari adanya informasi yang tidak tepat dan dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan baik itu pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal dari perusahaan, maka perlu dilakukan audit atas laporan keuangan perusahaan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemakai laporan keuangan dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan tersebut (Ruchmawati, 2016).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018: h 1.3 para 09) tujuan dari suatu laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan memperlihatkan hasil pertanggungjawaban kinerja manajemen atas penggunaan seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Maka dari itu, jasa audit sangat diperlukan untuk menentukan kewajaran dan keakurasian informasi dari laporan keuangan entitas atau perusahaan. Dan hal ini pun sejalan dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri. Dan juga Peraturan Pemerintah yang lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 29 ayat 2 (j), yang didalamnya menyebutkan bahwa neraca dan laporan laba rugi wajib diaudit oleh akuntan publik. Dalam hal ini adalah saat entitas atau perusahaan ingin melaporkan pajak ke pemerintah harus diaudit terlebih dahulu laporan keuangannya. Pun juga ketika entitas atau perusahaan ingin mengajukan kredit atau pinjaman uang ke bank, syaratnya adalah menyetorkan laporan keuangan yang telah di audit. Mengapa demikian, karena jika laporan keuangan yang di setorkan tidak di audit terlebih dahulu, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak eksternal, sebab tidak dapat diketahui apakah laporan keuangan tersebut akurat dan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau tidak.

Dan dalam hal ini Profesi Akuntan Publik sangat dipercaya untuk memberikan penilaian independen terhadap laporan keuangan yang berisi informasi terkait kinerja perusahaan. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang baik, agar tujuan itu dapat tercapai maka auditor diharuskan untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar audit yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia, yaitu sesuai dengan Standar Auditing yang terdapat didalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodefikasi berbagai pernyataan standar teknis yang menjadi panduan dalam memberikan jasa bagi para akuntan publik di Indonesia. SPAP disusun dan dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). SPAP merupakan hasil pengembangan berkelanjutan standar profesional akuntan publik yang dimulai sejak tahun 1973. (<https://id.wikipedia.org>)

Salah satu hal yang paling disorot dan harus sangat diperhatikan adalah saat dilaksanakannya pekerjaan lapangan oleh auditor, karena sebelum pelaksanaannya harus dilakukan perencanaan yang baik dan tepat agar sesuai dengan standar yang berlaku, terlebih jika berkaitan dengan perusahaan yang memiliki tingkat resiko kecurangannya besar, maka pekerjaan lapangan yang akan dilakukan sangat membutuhkan perencanaan yang andal dan harus diawasi sebagaimana mestinya, dan juga supaya tidak terjadi kesia-siaan dalam proses pekerjaan lapangan tersebut. Karena, perencanaan audit merupakan tahapan proses auditing yang sangat menentukan dalam keberhasilan penugasan audit. Rencana audit dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan audit tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif (Hasanah Uswatun 2013: h 565). Oleh sebab itu, tahap-tahap perencanaan audit merupakan tahapan yang harus menjadi salah satu perhatian yang serius dari auditor. Perencanaan bukan merupakan satu fase audit yang terpisah dari fase audit lainnya, tetapi lebih merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berulang yang sering dimulai seketika setelah (atau dalam hubungannya dengan) penyelesaian audit periode sebelumnya dan berlanjut hingga penyelesaian perikatan audit periode kini (SA 300, Para A2). Dalam Standar Audit (“SA”) 300 para 9 (c) menyatakan bahwa prosedur audit lainnya yang direncanakan harus dilaksanakan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh SA (Standar Audit).

Perencanaan audit yang memadai tercantum pada Standar Auditing (“SA”) 300 para 7 tentang aktivitas perencanaan yang menyatakan bahwa “Auditor harus menetapkan strategi audit secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit serta yang memberikan panduan dalam pengembangan rencana audit.” Standar audit ini berisi tentang acuan bagi para akuntan publik dalam melaksanakan audit berdasarkan standar auditing dalam mempertimbangkan dan menerapkan prosedur perencanaan dan supervisi, termasuk penyiapan program audit, pengumpulan informasi tentang bisnis entitas klien, dan penyelesaian pendapat atas temuan yang ada diantara personel KAP. Perencanaan audit ini meliputi pengembangan strategi secara menyeluruh dalam pelaksanaannya dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, saat, dan luas perencanaan bervariasi, dengan ukuran dan kompleksitas entitas yang di audit, pengalaman mengenai entitas, dan

pengetahuan mengenai bisnis entitas. Dalam menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus mempertimbangkan Standar Auditing (“SA”) 300 para 8 yaitu, antara lain: (a) Mengidentifikasi karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkupnya, (b) Memastikan tujuan pelaporan perikatan untuk merencanakan waktu audit dan sifat komunikasi yang disyaratkan, (c) Mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan profesional auditor, signifikan dalam mengarahkan usaha tim perikatan, (d) Mempertimbangkan hasil aktivitas awal perikatan dan, jika relevan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang telah dilaksanakan oleh rekan perikatan adalah relevan untuk entitas yang akan diaudit, dan (e) Memastikan sifat, saat, dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan. Bila hal-hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik, maka dapat dikatakan perencanaan awal audit telah memadai.

Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, auditor bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan regulasi yang berlaku. Menurut standar auditing (“SA”) 200 para 11, dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, terdapat dua tujuan keseluruhan auditor. Pertama, memperoleh keyakinan yang andal dan kuat tentang apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan telah bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kedua, melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh Standar Auditing (“SA”) berdasarkan temuan auditor.

Menurut Pusat Pembinaan Profesi Keuangan tentang daftar Kantor Akuntan Publik yang telah memiliki izin dari Kementerian Keuangan pertahun 2018 yang diterbitkan melalui website resmi Kemenkeu yang telah bekerjasama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), terdapat 444 Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dalam organisasi IAPI, sedangkan per 31 januari 2019 PPPK melalui Kemenkeu kembali merilis daftar KAP yang telah memiliki izin dan dapat menjalankan usahanya yaitu sebanyak 470 KAP yang tersebar di beberapa daerah

di Indonesia. Itu berarti di awal tahun 2019 saja sudah ada kenaikan sekitar 5,8% atas izin diperbolehkannya KAP untuk beroperasi. Sehingga secara tidak langsung dengan semakin banyaknya Kantor Akuntan Publik yang beroperasi sekarang ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hal ini dapat menimbulkan persaingan yang ketat antar kantor akuntan publik. Oleh karenanya, saya selaku peneliti dan juga staff audit dari KAP Wisnu dan Katili berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap perencanaan audit laporan keuangan KAP Wisnu dan Katili untuk menilai kesesuaian perencanaan audit laporan keuangannya dengan SPAP. Karena, kebetulan KAP Wisnu dan Katili ini merupakan Kantor Akuntan Publik yang tergolong baru dan baru berumur 1 tahun yang pastinya masih membutuhkan perbaikan dan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Dan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini, sedikit banyak diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap penilaian kinerja audit, khususnya dalam hal penilaian kesesuaian atas **perencanaan audit laporan keuangan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang terdapat pada KAP Wisnu & Katili.**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini mencakup:

1. Apakah Terdapat desain perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP Wisnu & Katili sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam SPAP?
2. Apakah operasional dari perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP Wisnu & Katili sesuai dengan desain yang telah dibuatnya sesuai ketentuan yang terdapat didalam SPAP?
3. Apakah desain dan operasional perencanaan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Wisnu & Katili telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku saat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilandasi dengan rumusan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui desain perencanaan audit atas laporan keuangan yang dilakukan pada KAP Wisnu & Katili.
2. Untuk mengetahui apakah operasional dari perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP Wisnu & Katili telah sesuai dengan desainnya.
3. Untuk mengetahui apakah desain dan operasional perencanaan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Wisnu & Katili telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan bagi para pembaca terkait aspek perencanaan audit atas laporan keuangan yang terjadi didalam KAP yang selanjutnya dijadikan gambaran dan juga acuan tentang perbedaan antara teori audit dengan bagaimana penerapan aslinya di KAP.

2. Bagi KAP Wisnu & Katili

Dapat memberikan data maupun informasi dan juga bahan diskusi yang dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan untuk melakukan evaluasi apakah telah sesuai perencanaan audit atas laporan keuangan yang selama ini dijalankan dengan ketentuan yang ada berdasarkan SPAP.

3. Bagi Para Akuntan dan Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai masukan dan juga tambahan sumber referensi yang dapat digunakan lebih lanjut untuk pembahasan penelitian selanjutnya yang terkait dengan perencanaan audit atas laporan keuangan ataupun hal-hal terkait lainnya yang mendekati materi penelitian ini.

1.5 Batasan Masalah

Perencanaan audit laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan audit KAP Wisnu & Katili yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2017 dan 2018.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Didalam Bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, lalu bagaimana rumusan masalahnya, juga terdapat tujuan dari dilakukannya penelitian ini, serta juga terdapat apa saja manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, dan diakhiri dengan batasan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di Bab ini berisi uraian teori yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan pada umumnya, dan juga berisi tentang perencanaan audit atas laporan keuangan pada khususnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menerangkan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitiannya yang meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini akan berisi tentang profil organisasi /perusahaan yang di jadikan tempat untuk studi kasus, hasil dari analisi data, dan juga pembahasan (diskusi) hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Dan di Bab terakhir ini akan berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga implikasi manajerial yang dianggap penting dan diperlukan.